

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara serta Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002,

Indonesia. Undang – Undang Dasar NRI 1945 Amandemen IV. LN. No. 14 Tahun 2006.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. UU No. 12 Tahun 2011. LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

Undang-undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik

### Buku

Arif Ainul Yaqin, Fenomena Transplantasi Hukum Politik Hukum dan Sumber daya Alam, Bahan Ajar Mahasiswa Pasca Sarjana perminatan SDA tahun ajaran 2019

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan pilar-pilar Demokrasi, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal 5

Maria Farida Indrati, Ilmu perundang-undangan (Jakarta, kanisius: 2007), hal 179

Muhammad Insa Ansari, (Placeholder1) (Placeholder1)

Muhammad Irham Roihan, SH (2021): Omnibus law ditinjau dari perspektif sistem perundang-undangan di Indonesia (studi Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja)< Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca sarjana fakultas hukum Universitas Islam Indonesia

Peter Machmud Marzuki, Penelitian Hukum edisi Revisi cetakan ke 12 (Jakarta Prenandamedia Group[, 2016) hal. 137

Satya Arinanto, Pengantar Perbandingan sistem hukum, (Jakarta: PT> Rajagrafindo Persada 2004, hal 116

## Karya Ilmiah

- Aminuddin Kasi, “Proses pembentukan Undang-undang pasca pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR, dalam <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/aktualita/article/download/2479/1622>
- Dewi Sartika Putri: Penerapan Omnibus Law cipta kerja di Indonesia, efektif atau tidak? Tinjauan berdasarkan sistem hukum di Indonesia; Jurnal Hukum &Pembangunan 51 N0. 2 April – Juni (2021):
- Dita Rizkia Putri 2020: Analisis dampak UU Cipta Kerja terhadap perusahaan dan investasi di Indonesia
- Dwi Kusumo Wardhani, “Disharmonisasi Antara RUU Cipta Kerja BAB Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 15 Tahun 1960 Temtang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm 488
- Eko Noer Kristiyanti, Urgensi omnibus Law dalam percepatan reformasi regulasi dalam perspektif hukum progresif, jurnal De Jure Vol. 20 No. 2 Juni 2020, ha 236
- Firman Freddy Busroh, Konseptualisasi Omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan, arena hukum vol 10 no.2 agustus 2017
- Fransisca Kristiastuti; 2. Utari Kartika Sari, Fakultas Ekonomi Universitas Nurtanio, Bandung: analisis reaksi pasar modal Indonesia terhadap penetapan UU Cipta Kerja: Jurnal Administrasi Bisnis vol 17 no. 2 Desember 2021,
- Galuh Kartika, Ludfi Djanjanto, Rosy Aprieza Puspita Zandra: Penerapan omnibus Law di bidang investasi sebagai upaya penyelesaian regulasi perizinan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia
- Herawati RAS dan 2. Joko Trio Suroso, Universitas Langlangbuana, Bandung: Kepastian Hukum dalam Hukum investasi di Indonesia melalui omnibus Law Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi) vol 4 no. 1 2020 hal 392 – 408:

Info Singkat bidang Ekonomi dan kebijakan publik, Hilma Meilani, Hambatan dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia, dan solusinya, kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis Vol. XI, No.19/I/Puslit/Oktober/2019

Info singkat, hambatan dalam berinvestasi di Indonesia dan solusinya, Hilma meilani, Vol. XI, No.19/I/Puslit/Oktober/2019

M.Ilham F. Putuhena, Politik Hukum perundang-undangan dalam upaya meningkatkan kualitas produk legislasi, Jurnal RechtsVinding Vol. 1 No. 3 Desember 2012, hal 346-347

Muhamad Insa Ansari: Omnibus Law untuk menata regulasi penanaman modal Jurnal Rechts Vinding, vol 9 nomor 1 April 2020

Rianda Dirkaresha, Ismail Koto dan Ikhsan Lubis 2021, omnibus Law sebagai percepatan Perekonomian Bangsa di sektor Pasar Modal

Vincent Suriadinata, Penyusunan Undang-undang di bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus law di Indonesia, Jurnal hukum vol 4 No. 1 (oktober 2019) hal 131

Zaka Firma Aditya dan M Reza Winata,"Rekonstruksi hirarkhi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Negara Hukum vol. 9 No. 1 Juni 2018 hal 88-89

### **Sumber Lainnya**

Bottleneck investasi Indonesia, Deputy Bidang Pengembangan Iklim penanaman modal bahan Presentasi Dampak UU Cipta Kerja terhadap investasi Indonesia, 8Desember 2020

Harian Repblika tanggal 1 Oktober 2019

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), regulatory reform and innovation, <https://www.oecd.org/sti/inno/2102514.pdf>.hal 3

Presiden: UU Cipta Kerja beri dampak signifikan terhadap iklim usaha dan investasi

Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2021 dan  
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Perubshsn tahun 2020-  
2024

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), PSHK sampaikan masukkan Prolegnas  
dan omnibus law [https://pshk.or.id/highlight-id/pshk-sampaikan masukan](https://pshk.or.id/highlight-id/pshk-sampaikan-masukan-prolegnas-dan-omnibus-law)  
prolegnas dan omnibus law,

Rio Christiawan, menakar implementasi omnibus law:  
<https://analisis.kontan.co.id/news/menkar-implementasi-omnibus-law>

Rofiq Hidayat, Omnibus Law mestinya jadi pintu masuk pembenahan hyper  
regulation, [https://edoaomdpmesoa.com/read-detail/266789-omnibus-law-](https://edoaomdpmesoa.com/read-detail/266789-omnibus-law-mestinya-jadi-pintu-masuk-pembenahan-hyper-regulasi/)  
[mestinya-jadi-pintu-masuk-pembenahan-hyper-regulasi/](https://edoaomdpmesoa.com/read-detail/266789-omnibus-law-mestinya-jadi-pintu-masuk-pembenahan-hyper-regulasi/),

Utami, D.N. (2020) retrieved from <http://market.bisnis.com/omnibus> law bawa  
efek positif ke pasar modal=aei-berikan dukungan

World Bank Group. (2019). "Doing Business 2019". A World Bank  
GroupFlagship Report, hal. 2. Yuliandri,Asas-asas pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan yang baik (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)  
halaman 1

Agatha olivia Victoria, Sri Mulyani Nilai Birokrasi Indonesia Tak Ramah Bagi  
Investor.Artikel ini telah tayang di [Katadata.co.id](http://Katadata.co.id) dengan judul "Sri Mulyani Nilai  
Birokrasi Indonesia Tak Ramah Bagi Investor" , Penulis: Agatha Olivia  
Victoria Editor: Febrina Ratna Iskana

Kemenko Perekonomian, Penjelasan RUU Cipta Kerja (Dalam bentuk presentasi), Forum  
Group Discussion,FPG DPR RI, 26 Februari 2020

Muhammad irham roihan, s.h. (2021): Omnibus law ditinjau dari perspektif sistem  
perundang- undangan di indonesia, tesis program magister Universitas Islam  
Indonesia, Malang

Averos Aulia Ananta Nur (2020) **Tinjauan Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja**  
(Paper Disusun untuk Memenuhi Tugas Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Ilmu  
Perundang-Undangan),Paper Disusun untuk Memenuhi Tugas Ujian Tengah  
Semester Mata Kuliah Ilmu Perundang-Undangan

Anugrah tinor lono (2018): pengaruh investasi pemerintah dan swasta terhadap  
penyerapan tenaga kerja di kota makassar provinsi sulawesi-selatan periode 2008-

2017, ilmu ekonomi dan studi pembangunan fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar

BKPM (2017): Improvement of the Ease of Doing business in Indonesia, Presentasi tentang Indonesia Ease of doing business

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (2020) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Birokrasi (Presentasi)

Vincent Suriadinata (2019):Penyusunan undang-undang di bidang investasi: kajian pembentukan omnibus law di indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019, Halaman 115-134

DR. Faizal Kurnniawan LLM, Presentasi: Omnibus law sebagai landasan harmonisasi hukum, dalam bidang hukum Perdata di Indonesia,

Muhammad Insa Ansari (2019), *omnibus law* untuk menata regulasi penanaman modal, Jurnal Rechts Vinding **Volume 9 Nomor 1, April 2020, hal 77-90**